



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jenderal Sudirman No. Telepon & FAX (0742) 21021 E-mail p3ap2kbkabtanjabbarat@yahoo.com

KUALA TUNGKAL

Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE AKIP Internal Terhadap LKJIP
Tahun 2025

No	Kode	Hasil Evaluasi AKIP Internal Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
1	1.a	Terdapat ketidakselarasan antara indikator kegiatan dengan kegiatan	Penetapan Indikator Kegiatan telah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan pembangunan dan keuangan Daerah. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga yang menjadi indikator keluaran adalah jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga kewenangan kab/kota	Tertuang dalam LKJIP halaman	Selesai
	1.b	Terdapat 1 (Satu) Kegiatan yang tidak mendukung capaian program	Penetapan Indikator Kegiatan telah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan pembangunan dan keuangan Daerah. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga yang menjadi indikator keluaran adalah jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga kewenangan kab/kota	Bukti Dukung Terlampir	Selesai
2	2.a	Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan	Dilakukan perbaikan pengelolaan data kinerja		Selesai

		untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan atau belum terstruktur	melalui penyusunan mekanisme pengumpulan data yang terstruktur, penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan pencatatan data, serta penegasan sumber data yang valid agar data yang dihimpun relevan dalam mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Dan dilakukan pertemuan tiap triwulan sebagai monitoring dan evaluasi		
	2.b	Meningkatkan peran aktif pimpinan dan atasan masing masing pegawai untuk mendorong semua pegawai mengoptimalkan impelentasi SAKIP sehingga dapat terbentuk persamaan persepsi bahwa SAKIP tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen tetapi memerlukan Langkah nyata dari semua level, level individu untuk mewujudkan perangkat daerah lebih akuntabel	Mendorong peran aktif pimpinan dan atasan langsung melalui penguatan arahan, pembinaan, dan pengawasan agar implementasi SAKIP tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen, tetapi diwujudkan secara nyata oleh semua pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah.	Bukti Rapat	Selesai
3	3.a	Efisiensi pengguna anggaran yang disajikan pada laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) DP3AP2KB belum menjelaskan secara detail analisis besaran efisiensi dari perbaikan kegiatan/aktivitas atau dari pengurangan rincian aktivitas/biaya	Telah Dilakukan penyempurnaan penyajian efisiensi anggaran dalam LKjIP melalui analisis yang lebih rinci terhadap besaran efisiensi yang dihasilkan dari perbaikan kegiatan/aktivitas maupun pengurangan rincian aktivitas dan biaya.	Terlampir dan menjadi bagian dokumen laporan LKJiP	Selesai
	3.b	Dokumen LKJIP DP3AP2KB belum menginfokan hambatan pencapaian kinerja maupun Upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan	Dilakukan penyempurnaan penyajian LKjIP dengan menginformasikan hambatan pencapaian kinerja serta upaya perbaikan yang akan dilakukan pada periode berikutnya.	Tertuang dalam LKJiP	Selesai
4	4.a	Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi target kinerja di level nasional (Benchmark	Dilakukan penyempurnaan penyajian laporan kinerja melalui perbandingan realisasi kinerja dengan target	Tertuang dalam LKJiP	Selesai

		Kinerja) sehingga perlu dilakukan penyempurnaan target.	kinerja di tingkat nasional (benchmark kinerja) sebagai dasar penyempurnaan penetapan target kinerja ke depan.		
--	--	---	--	--	--



Pt. KEPALA DINAS,

AINA DEWIANA, S.Pd

Pembina

NIP. 19721030 199203 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jend. Sudirman No. Telp/Fax. (0742) 21021 Email :dinas3ap2kb.tanjabbarkab@gmail.com

KUALA TUNGKAL

Kuala Tungkal, 06 Januari 2026

Nomor : 000.7.5/066/P3AP2KB.Per/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Tahun Anggaran 2025

Kepada

Yth. Bapak/Ibu

1. Kabid. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
2. Kabid. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Kabid. Pengendalian Penduduk
4. Kabid. Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Kepala UPT-PPA

Menindaklanjuti surat Bupati Nomor: 000.7/8/BUPATLI/BAPPEDA/2026 tanggal 02 Januari 2026 perihal Permintaan Data LKPJ TA.2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka di minta saudara untuk dapat hadir di dalam rapat penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026

Pukul : 08.30 s.d Selesai

Tempat : Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Diminta untuk masing-masing Kepala Bidang, Kepala UPT-PPA mengikut sertakan Pejabat Fungsional dan membawa data dukung terkait penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Ama Dewi, A.Md.Keb, S.Pd

NIP. 19721030 199203 2 004

Note: *Wajib untuk hadir dalam rapat dan tidak bisa wakili*

ABSENSI
RAPAT INTERNAL DINAS P3AP2KB TANJAB BARAT
TAHUN 2026

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026

Acara : Rapat Pembahasan LKPJ dan Sakip

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Aina Dwiiana	Sekretaris	1
2			2
3	Dessy Haryaty	Kabid PUGPP	3
4	Hapni Rohanawati	Kabid IPHA	4
5	Gumuhm	Kabid KBX KB	5
6	Ade Rahmawati	Kabid Daiduk	6
7			7
8	Hendri	Kasubag.	8
9	SITI NOPITA	Analisis Kebijakan	9
10	Sopini	Staf Daiduk	10
11	Sindi Yasinta	Staf TU	11
12	HARDIYANTI	Ka. UPT PPA	12
13	Novil Cut Nizar	Psikolog kons. UPT PPA	13
14	Amar Farhan	Penata Layanan Operasional	14
15	Doro En' wamono	Staf UPT PPA	15
16	Rica Maharani	Staf PP	16
17	Warsiyan	Staf KB	17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25



Mr. Kepala Dinas,

Aina Dwiiana, S.Pd.

Pembina

NIP. 19721030 199203 2 004



NOTULEN RAPAT

HARI : KAMIS

TANGGAL : 08 JANUARI 2026

PERIHAL : RAPAT PEMBAHASAN LKPJ DAN SAKIP

POINT – POINT PEMBAHASAN

1. DISEPAKATI BAHWA TARGET CAPAIAN SAKIP TAHUN 2026 ADALAH PREDIKAT (A) SEBAGAI BENTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI.
2. BERDASARKAN HASIL EVALUASI TERAKHIR, UNTUK MENCAPAI PREDIKAT A MASIH TERDAPAT KEKURANGAN SEBESAR 6 (ENAM) POIN, SEHINGGA DIPERLUKAN UPAYA PERBAIKAN YANG TERENCANA, TERUKUR, DAN BERKELANJUTAN.
3. PELAPORAN KINERJA DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERLU TERUS DITINGKATKAN, BAIK DARI SISI KUALITAS DATA, KONSISTENSI INDIKATOR, MAUPUN KETEPATAN ANALISIS.
4. SETIAP LAPORAN KINERJA WAJIB DISUSUN SECARA DETAIL DAN SISTEMATIS, DENGAN MENJABARKAN KETERKAITAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN, SERTA MENGGAMBARAKAN CAPAIAN KINERJA YANG TERUKUR.
5. MASING-MASING BIDANG DIWAJIBKAN MENYUSUN JADWAL KEGIATAN SECARA RUTIN, SEHINGGA SETIAP RAPAT INTERNAL DAN KEGIATAN LAINNYA DAPAT TERAGENDA DENGAN BAIK DAN TERDOKUMENTASI SECARA TERTIB.
6. SETIAP PENYUSUNAN LAPORAN HARUS MEMUAT PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA, DISERTAI NARASI ANALISIS YANG MENJELASKAN PERKEMBANGAN, KENDALA, DAN UPAYA PERBAIKAN.
7. SETIAP BIDANG DIMINTA UNTUK MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SDM YANG ADA, DENGAN PRINSIP *MENULISKAN APA YANG DIKERJAKAN DAN MENGERJAKAN APA YANG DITULISKAN*, GUNA MENDUKUNG PENCAPAIAN PROGRAM DAN PENINGKATAN LHE SAKIP TAHUN 2026.
8. SETIAP BIDANG DIWAJIBKAN UNTUK MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI SECARA RUTIN DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI DASAR PERBAIKAN KINERJA DAN PENYEMPURNAAN LAPORAN.
9. PELAPORAN KINERJA DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERLU TERUS DITINGKATKAN, BAIK DARI SISI KUALITAS DATA, KONSISTENSI INDIKATOR, MAUPUN KETEPATAN ANALISIS.
10. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) AGAR DIIDENTIFIKASI SECARA JELAS SERTA DIJADIKAN CATATAN PERBAIKAN DALAM PENINGKATAN SAKIP.
11. SETIAP BIDANG DIMINTA MENGGUNAKAN ACUAN KERJA YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TOLOK UKUR EVALUASI, PERBAIKAN, DAN PERHATIAN DALAM PELAKSANAAN KINERJA KE DEPAN.
12. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) YANG TELAH DISUSUN AGAR DIPELAJARI KEMBALI OLEH MASING-MASING BIDANG SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENCAPAIAN KINERJA.

13. PERJANJIAN KINERJA HARUS DISUSUN SECARA BENAR, DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN, DAN DILAPORKAN SECARA AKURAT, SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN NILAI AKIP.
14. PERJANJIAN KINERJA WAJIB DISUSUN DAN DILAPORKAN SECARA BERJENJANG SESUAI TINGKAT JABATAN, GUNA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DALAM IMPLEMENTASI SAKIP.
15. SEBELUM DATA DISAMPAIKAN KEPADA BIDANG PERENCANAAN, MASING-MASING BIDANG DIMINTA UNTUK MELAKUKAN PENGECEKAN DAN VALIDASI DATA SECARA CERMAT, GUNA MEMASTIKAN KEAKURATAN DAN KEABSAHAN DATA YANG DIGUNAKAN.
16. BIDANG PERENCANAAN DIMINTA UNTUK MENYUSUN FORMAT/FORM DATA LAPORAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SAKIP 2026, SEHINGGA PROSES PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA LEBIH TERARAH DAN TERUKUR.
17. SELURUH BIDANG DIWAJIBKAN UNTUK MENGISI LKPJ TAHUN 2025 SECARA LENGKAP DAN BERTANGGUNG JAWAB, DENGAN MENYAJIKAN INFORMASI MENGENAI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN, REALISASI CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN, UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN TERSEBUT, SERTA TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI. PENYUSUNAN LKPJ AGAR DIDUKUNG OLEH DATA YANG VALID, DISAJIKAN SECARA SISTEMATIS, DAN SELARAS DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN SERTA LAPORAN KINERJA LAINNYA, SEHINGGA DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN EVALUASI DAN PERBAIKAN KINERJA KE DEPAN.
18. SETIAP KEPALA BIDANG DIWAJIBKAN MEMILIKI DAN MENYUSUN LAPORAN PROGRAM SECARA MANDIRI, SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB ATAS PELAKSANAAN PROGRAM YANG MENJADI KEWENANGANNYA, SEKALIGUS SEBAGAI BAHAN PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA.

KUALA TUNGKAL, 08 JANUARI 2026


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPINANG
PLT. KEPALA DINAS P3AP2KB
ANA DEWIANA, S.PD.
NIP.197210301992032004

PENCATAT



MUSLIHANA, SE
NIP.197705071007032002

**RINCIAN BELANJA, REALISASI, DAN EFISIENSI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Rasio Capaian	Rasio Efisiensi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	6.712.495.985	5.922.511.591	789.984.394	88,23%	11,77%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.704.672.685	4.080.760.005	623.912.680	86,74%	13,26%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	266.120.000	253.405.000	12.715.000	95,22%	4,78%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.420.927.685	3.809.734.255	611.193.430	86,17%	13,83%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	17.625.000	17.620.750	4.250	99,98%	0,02%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	459.491.400	443.059.115	16.432.285	96,42%	3,58%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.776.066	223.934	97,20%	2,80%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.580.000	16.311.485	3.268.515	83,31%	16,69%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	60.035.200	57.682.080	2.353.120	96,08%	3,92%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.076.200	79.854.099	222.101	99,72%	0,28%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.800.000	281.435.385	10.364.615	96,45%	3,55%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.599.600	104.315.678	7.283.922	93,47%	6,53%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	91.800.000	86.033.698	5.766.302	93,72%	6,28%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	19.799.600	18.281.980	1.517.620	92,34%	7,66%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	577.175.000	492.972.900	84.202.100	85,41%	14,59%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.740.000	46.968.125	59.771.875	44,00%	56,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.540.000	15.710.000	11.830.000	57,04%	42,96%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	415.470.000	414.417.575	1.052.425	99,75%	0,25%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.425.000	15.877.200	11.547.800	57,89%	42,11%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.624.800	48.224.800	4.400.000	91,64%	8,36%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Rasio Capaian	Rasio Efisiensi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.374.800	38.574.800	800.000	97,97%	2,03%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.250.000	9.650.000	3.600.000	72,83%	27,17%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	467.876.000	446.270.300	21.605.700	95,38%	4,62%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Pengadaan Mebel	46.376.000	28.069.680	18.306.320	60,53%	39,47%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	421.500.000	418.200.620	3.299.380	99,22%	0,78%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.056.500	306.908.793	32.147.707	90,52%	9,48%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.250.000	3.250.000	0	100%	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.226.500	89.188.788	31.037.712	74,18%	25,82%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215.580.000	214.470.005	1.109.995	99,49%	0,51%
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	836.571.200	775.287.276	61.283.924	92,67%	7,33%
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	90.607.000	82.573.500	8.033.500	91,13%	8,87%
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	50.607.000	47.577.500	3.029.500	94,01%	5,99%
Advokasi kebijakan dan pendampingan Penyelenggara PUG kewenangan Kab/Kota	40.000.000	34.996.000	5.004.000	87,49%	12,51%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota	695.964.200	649.893.776	46.070.424	93,38%	6,62%
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	695.964.200	649.893.776	46.070.424	93,38%	6,62%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	50.000.000	42.820.000	7.180.000	85,64%	14,36%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Rasio Capaian	Rasio Efisiensi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	42.820.000	7.180.000	85,64%	14,36%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	5.226.935.600	5.132.687.830	94.247.770	98,20%	1,80%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.186.936.000	5.103.338.230	83.597.770	98,39%	1,61%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	107.624.000	80.168.000	27.456.000	74,49%	25,51%
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota	5.079.312.000	5.023.170.230	56.141.770	98,89%	1,11%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	39.999.600	29.349.600	10.650.000	73,37%	26,63%
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.999.600	29.349.600	10.650.000	73,37%	26,63%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	147.244.000	122.873.400	24.370.600	83,45%	16,55%
<i>Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah</i>	77.644.000	70.903.400	6.740.600	91,32%	8,68%
Pelaksanaan Komunikasi, informasi dan Edukasi KG dan perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	77.644.000	70.903.400	6.740.600	91,32%	8,68%
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Hikekeluargaan dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/ Kota	69.600.000	51.970.000	17.630.000	74,67%	25,33%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	69.600.000	51.970.000	17.630.000	74,67%	25,33%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-				

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Rasio Capaian	Rasio Efisiensi
Pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	-				
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota					
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	357.034.800	309.003.362	48.031.438	86,55%	13,45%
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	257.035.000	240.613.676	16.421.324	93,61%	6,39%
Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	167.202.000	161.222.555	5.979.445	96,42%	3,58%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	89.833.000	79.391.121	10.441.879	88,38%	11,62%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	99.999.800	68.389.686	31.610.114	68,39%	31,61%
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	28.406.170	21.593.830	56,81%	43,19%
Penguatan Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.999.800	39.983.516	10.016.284	79,97%	20,03%
Program Perlindungan Khusus Anak	137.029.000	108.209.206	28.819.794	78,97%	21,03%
Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkah Daerah Kabupaten/Kota	86.129.000	60.652.500	25.476.500	70,42%	29,58%
Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.129.000	40.652.500	25.476.500	61,47%	38,53%
Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK	20.000.000	20.000.000	0	100%	0%
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.900.000	47.556.706	3.343.294	93,43%	6,57%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Rasio Capaian	Rasio Efisiensi
Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota	50.900.000	47.556.706	3.343.294	93,43%	6,57%
Program Pengendalian Penduduk	779.099.800	691.017.000	88.082.800	88,69%	11,31%
Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	64.876.000	61.601.000	3.275.000	94,95%	5,05%
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, SLTP/MTs, Jalur Nonformal, dan informal	64.876.000	61.601.000	3.275.000	94,95%	5,05%
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	714.223.800	629.416.000	84.807.800	88,13%	11,87%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	62.000.000	62.000.000	0	100%	0%
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	413.423.800	391.616.000	21.807.800	94,73%	5,27%
Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	82.800.000	75.400.000	7.400.000	91,06%	8,94%
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	156.000.000	100.400.000	55.600.000	64,36%	35,64%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.891.708.000	4.426.591.944	465.116.056	90,49%	9,51%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.746.900.000	1.561.156.472	185.743.528	89,37%	10,63%
Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	879.900.000	765.560.000	114.340.000	87,01%	12,99%
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000	99.952.000	48.000	99,95%	0,05%
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	195.000.000	151.990.000	43.010.000	77,94%	22,06%
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangga Kencana	572.000.000	543.654.472	28.345.528	95,04%	4,96%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Rasio Capaian	Rasio Efisiensi
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.187.373.000	2.060.674.100	126.698.900	94,21%	5,79%
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.072.000.000	955.850.000	116.150.000	89,17%	10,83%
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.115.373.000	1.104.824.100	10.548.900	99,05%	0,95%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	711.795.000	642.957.372	68.837.628	90,33%	9,67%
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	630.880.000	588.755.372	42.124.628	93,32%	6,68%
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitasi Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	80.915.000	54.202.000	26.713.000	66,99%	33,01%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	245.640.000	161.804.000	83.836.000	65,87%	34,13%
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	24.040.000	22.574.000	1.466.000	93,90%	6,10%
Pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	221.600.000	139.230.000	82.370.000	62,83%	37,17%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.870.897.200	1.756.319.200	114.578.000	93,88%	6,12%
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	392.497.200	277.919.200	114.578.000	70,81%	29,19%
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	140.002.400	134.577.400	5.425.000	96,13%	3,87%

